

**BAHASA-BAHASA ETNIS DAN DIALEK BAHASA LOLODA DI LOLODA
MALUKU UTARA**
(Salah Satu Warisan Budaya Takbenda Masyarakat Loloda)

Mustafa Mansur

Rusli M. Said

Halida Nuria

Universitas Khairun

email: mustafa.mansur8@gmail.com

Abstrak

Bahasa-bahasa etnis dan dialek bahasa Loloda di Loloda merupakan salah satu warisan budaya takbenda (WBTB) yang perlu dilestarikan. Secara umum, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek pertumbuhan, perubahan, perkembangan, dan keberlanjutan bahasa-bahasa etnis dan dialek bahasa Loloda yang terdapat di Loloda saat ini. Adapun secara khusus, artikel ini ditujukan untuk pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal agar berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan pendekatan konsep difusi dan akulturasi kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Loloda merupakan elaborasi dari rumpun bahasa non-Austronesia yang telah digunakan oleh komunitas awal masyarakat Loloda yang terdiri dari Soa Bakun, Soa Laba, dan Soa Kedi yang diperkirakan sudah ada sebelum abad ke-13 M. Adapun bahasa Galela masuk ke Loloda melalui proses difusi dan akulturasi pada perempatan terakhir abad ke-16 M. Sementara bahasa Tabaru diperkirakan masuk ke Loloda melalui difusi setidaknya terjadi pada abad ke-19 M, sedangkan bahasa Ternate masuk di Loloda melalui akulturasi pada abad ke-18 M, yang persebarannya digunakan oleh masyarakat yang bermukim di negeri Soa-Sio, Tolofuo, Kahatola, dan sebagian warga masyarakat Baja. Kondisi kebahasaan di Loloda merupakan sebuah realitas sosial yang menjelma dalam wujud kebudayaan sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) yang perlu dilestarikan agar terhindar dari ancaman kepunahan.

Kata Kunci: Loloda, kebahasaan, kebudayaan, identitas, pelestarian.

**ETHNIC LANGUAGES AND LOLODA DIALECTS
IN LOLODA NORTH MALUKU**
(One of the Intangible Cultural Heritage of the Loloda Community)

Abstract

The ethnic languages and dialects of the Loloda language in Loloda are one of the intangible cultural heritages that need to be preserved. In general, this article aims to describe and analyze aspects of the growth, change, development, and continuity of ethnic languages and Loloda dialects that exist in Loloda today. Specifically, this article is aimed at preserving cultural values and local wisdom so that they contribute to sustainable development in West Halmahera Regency. The method used in this study is the historical method using the concept of cultural diffusion and acculturation. The results of the study show that the Loloda language is an elaboration of a non-Austronesian language family that was used by the early Loloda community consisting of Soa Bakun, Soa Laba, and Soa Kedi which are thought to have existed before the 13th century AD. The Galela language entered Loloda through a process of diffusion and acculturation in the last quarter of the 16th century AD. While the Tabaru language is thought to have entered Loloda through diffusion at least in the 19th century AD, while the Ternate language entered Loloda through acculturation in the 18th century AD, whose distribution was used by people living in the lands of Soa-Sio, Tolofuo, Kahatola, and some members of the Baja community. The condition of language in Loloda is a social reality that is manifested in the form of culture as an intangible cultural heritage that needs to be preserved to avoid the threat of extinction.

Keywords: Loloda, language, culture, identity, preservation.

Pendahuluan

Loloda merupakan salah satu etnis di Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, Loloda terletak di Halmahera bagian Utara, namun secara administrasi pemerintahan, Loloda merupakan suatu kecamatan yang berada pada dua pemerintahan kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Kecamatan Loloda sebagai kecamatan induk dan Kecamatan Loloda Tengah berada di bawah Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Loloda Kepulauan berada di bawah Kabupaten Halmahera Utara. Pembagian wilayah tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 21).

Loloda dalam perspektif pemerintahan tradisional merupakan salah satu Kerajaan Maluku yang tidak terkonfigurasi dalam kesatuan *Moloku Kie Raba* (Persatuan Empat Kerajaan Maluku) yakni

Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Beberapa sumber mengatakan bahwa persekutuan empat kerajaan ini dibangun melalui Konfederasi Moti pada 1322 (Amal, 2007: 207; Kusnanto dkk, 2010: 76). Namun ada sumber lain yang merekonstruksi bahwa *Moloku Kie Raha* adalah realitas politik yang diciptakan oleh mitos, di mana Konfederasi Moti atau *Moti Verbond* tidak terjadi pada tahun 1322 (Murid, 2019: 118). *Moti Verbond* dibuat Belanda untuk melayani kepentingan ekonomi, dengan asumsi daripada berperang sendiri dengan banyak suku bangsa yang tidak dikenal secara baik, langkah paling masuk akal adalah menggabungkan kerajaan-kerajaan yang berkonflik (Murid, 2019: 118).

Sebagai sebuah kerajaan, Loloda terbentuk dari entitas kultural. Dalam entitas itu, Loloda memiliki bahasa etnis yang disebut dengan bahasa Loloda. Eksistensi bahasa Loloda memang telah diakui sebagai suatu bahasa daerah di Maluku Utara sebagaimana terdapat dalam daftar bahasa-bahasa di Maluku Utara (Leirissa, 1999: 56). Namun, di samping bahasa Loloda, realitas saat ini menunjukkan bahwa di wilayah Loloda terdapat juga bahasa Ternate, Galela, dan Tabaru. Selain itu, ada juga dialek-dialek bahasa Loloda yang dikelompokkan ke dalam empat kelompok dialek yaitu dialek Bakun, dialek Laba, dialek Kedi, dan dialek Baru.

Keberadaan bahasa-bahasa dan dialek-dialek bahasa Loloda yang terdapat di Loloda menunjukkan keunikan tersendiri dalam perspektif identitas masyarakat Loloda sebagai masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, kondisi kebahasaan di Loloda ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji guna memperkuat identitas masyarakat Loloda.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana persebaran bahasa-bahasa dan dialek-dialek bahasa Loloda yang terdapat di Loloda. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah¹ dengan menggunakan konsep difusi² dan akulturasi kebudayaan.³

¹ Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif (Gottschalk, 1985: 32)

² Difusi kebudayaan dimaknai sebagai persebaran budaya karena terjadinya migrasi suatu kelompok masyarakat yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga masyarakat tersebut menetap di wilayah tersebut. Perpindahan tersebut akan mempengaruhi dari masyarakatnya khususnya pada system kebudayaannya (Pratama, Manalu, Rozak, 2022: 2)

³ Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan berbeda yang menyatu, tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri (<https://www.kompas.com>).

Pembahasan

Pada umumnya bahasa-bahasa di Nusantara tergolong rumpun bahasa Austronesia. Namun di Maluku Utara di samping ada bahasa-bahasa yang tergolong rumpun Austronesia itu terdapat pula bahasa-bahasa yang memiliki ciri-ciri yang lain sama sekali sehingga disebut bahasa-bahasa non-Austronesia. Di Indonesia, bahasa-bahasa yang tergolong non-Austronesia itu lebih banyak terdapat di sekitar Kepala Burung (Irian Jaya), sehingga para ahli bahasa menamakan bahasa-bahasa non-Austronesia yang terdapat di Indonesia itu sebagai bahasa non-Austronesia dari kelompok *West Papua Phylum* (Leirissa, 1999: 54; Masinambow, 2001: 142-142).

Di Maluku Utara terdapat kurang lebih 32 bahasa daerah termasuk bahasa Loloda. Di antara bahasa-bahasa itu ada yang tergolong rumpun Austronesia dan ada pula yang tergolong rumpun non-Austronesia (*West Papua Phylum*). Bahasa-bahasa yang tergolong non-Austronesia banyak terdapat di Halmahera Utara⁴ dan yang tergolong Austronesia lebih banyak tersebar di Halmahera Selatan (Leirissa, 1999: 54; Masinambow, 2001: 144-145). Dengan demikian maka secara geografis, wilayah Loloda yang terletak di Halmahera bagian utara, masuk dalam rumpun bahasa non-Austronesia.

Sebagai rumpun non-Austronesia, bahasa Loloda memiliki banyak persamaan dengan bahasa-bahasa non-Austronesia lainnya. Persamaan itu tampaknya dengan bahasa Galela, Tobelo, dan Ternate. Sebagai perbandingan, di bawah ini ditampilkan beberapa contoh kosa kata antara bahasa Ternate, Loloda, Galela, dan Tobelo.

Perbandingan Kosa-kata Bahasa Ternate, Loloda, Galela, dan Tobelo

Indonesia	Ternate	Loloda	Galela	Tobelo
Raja	<i>kolano</i>	<i>kolano</i>	<i>Kolano</i>	<i>kolano</i>
perdana menteri	<i>jogugu</i>	<i>jogugu</i>	<i>jogugu</i>	<i>jogugu</i>
adipati	<i>sangaji</i>	<i>sangaji</i>	<i>sangaji</i>	<i>sangaji</i>
hidung	<i>ngun</i>	<i>ngunungu</i>	<i>ngunu</i>	<i>ngunungu</i>
rambut	<i>butu</i>	<i>utu</i>	<i>butu</i>	<i>utu</i>
makan	<i>obo</i>	<i>ojomo</i>	<i>odo</i>	<i>odomo</i>
mati	<i>sone</i>	<i>sonenge</i>	<i>sone</i>	<i>bonenge</i>
telinga	<i>ngau</i>	<i>ngauku</i>	<i>ngau</i>	<i>ngauku</i>

⁴ Halmahera Utara yang dimaksud dalam kelompok bahasa Non-Austronesia meliputi juga Halmahera bagian barat, karena sebelum wilayah ini dijadikan sebagai Kabupaten Halmahera Barat yang terpisah dari Kabupaten Halmahera Utara, istilah Halmahera Utara mencakup kedua wilayah kabupaten tersebut.

dua	<i>sinoto</i>	<i>sinoto</i>	<i>sinoto</i>	<i>hinöto</i>
anak	<i>ngofa</i>	<i>ngoaka</i>	<i>ngopa</i>	<i>ngobaka</i>
lima	<i>romtoba</i>	<i>motoa</i>	<i>motoba</i>	<i>motoa</i>
manusia	<i>mancia</i>	<i>nyawa</i>	<i>nyawa</i>	<i>nyawa</i>
besar	<i>lamo</i>	<i>lamo</i>	<i>lamo</i>	<i>iyamoko</i>
Anjing	<i>kasu</i>	<i>kasu</i>	<i>kasu</i>	<i>kabo</i>
Sembilan	<i>sio</i>	<i>sio</i>	<i>sio</i>	<i>bio</i>

Sumber: Diolah dari Hueting, 1908: 376; Andi Atjo, 2009: 8; Mansur, 2013: 52.

Persamaan beberapa kosa-kata sebagai bahasa rumpun non-Austroneisa terhadap bahasa-bahasa non-Austronesia lainnya (Ternate, Galela, dan Tobaru) yang diuraikan di atas, membawa pengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungan bahasa-bahasa tersebut dalam sistem kultural masyarakat Loloda. Sebagaimana telah kemukakan bahwa di Loloda setidaknya terdapat empat bahasa etnis yakni bahasa Loloda, Galela, Tobaru, dan Ternate.

Bahasa Loloda

Bahasa Loloda adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Loloda. Bahasa ini merupakan elaborasi dari rumpun bahasa non-Austronesia yang diperkirakan mulai digunakan ketika terbentuknya komunitas awal masyarakat Loloda. Berdasarkan tradisi oral yang hidup dan berkembang di masyarakat Loloda mengungkapkan bahwa komunitas awal masyarakat Loloda terdiri dari tiga kelompok masyarakat yang disebut *soa* yaitu *Soa Bakun*, *Soa Laba*, dan *Soa Kedi*. Ketiga *soa* inilah yang menjadi cikal-bakal pembentukan Kerajaan Loloda.

Secara umum kerajaan-kerajaan Maluku termasuk Loloda diperkirakan berdiri pada abad ke-13 (de Graaff & Stibbe, 1918: 615; Hasan, 2001: 253; Kusnanto dkk, 2010: 74). Namun di antara kerajaan-kerajaan itu, disebutkan Loloda adalah yang tertua, di samping Kerajaan Moro (Amal, 2007: 203-203; Hasan, 20021: 253). Tulisan Paramita R. Abdurrahman yang berjudul “Moluccan Responses to the First Intrusions of the West” (1979: 163), menyebut bahwa di masa paling tua telah berkuasa seorang kolano yang kuat di Loloda Halmahera. Zaman tertua yang dimaksud itu memberikan kesan bahwa Kerajaan Loloda telah berdiri setidaknya sebelum kerajaan-kerajaan Maluku lain berdiri.

Berdasarkan gambaran mengenai masa pertumbuhan Kerajaan Loloda, maka dapat diperkirakan bahwa bahasa Loloda mulai digunakan oleh tiga komunitas awal masyarakat Loloda (*Soa*

Bakun, Soa Laba, dan Soa Kedi), setidaknya-tidaknya sebelum terbentuknya Kerajaan Loloda pada abad ke-13 M.

Pada tingkat perkembangan tertentu, bahasa Loloda memiliki beberapa varian atau dialek, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Loloda dibagi ke dalam beberapa dialek yakni dialek Bakun, Laba, Kedi, dan Baru. Keempat dialek bahasa ini merupakan penjelmaan dari suku-suku yang hidup di Loloda, yakni Suku Bakun, Laba, Kedi, dan Baru (de Clerk, 1890:74 ; Van Barda, 1904: 319; Van Frassen, 1979). Keempat dialek ini mewakili kelompok masyarakat yang menggunakan dialek tersebut. Bakun, Laba, dan Kedi adalah nama desa di Loloda yang terletak di Loloda bagian selatan. Dialek Bakun adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Loloda yang persebarannya dari Loloda Selatan sampai ke Loloda Utara dan Loloda Kepulauan, sehingga dialek inilah yang mungkin dikenal sebagai bahasa Loloda (Mansur, 2013: 53). Sementara dialek Laba hanya terdapat di Desa Laba Besar dan Desa Laba Kecil. Kedua desa ini terletak di daerah aliran sungai (DAS) Laba, Adapun Desa Bakun terletak di daerah aliran sungai (DAS) Soa-Sio. Sementara dialek Kedi digunakan oleh masyarakat Desa Kedi. Jika diperhatikan secara seksama, dialek Kedi ini merupakan campuran antara dialek Bakun dan Laba dengan bahasa Tabaru. Pengaruh bahasa Tabaru terhadap dialek Kedi mungkin karena letak Desa Kedi bertetangga dengan Desa Tasye yang merupakan Suku Tabaru. Jarak antara Desa Kedi dengan Tasye hanya sekitar satu kilo meter (km). Kondisi ini memungkinkan interaksi mereka terbangun (Mansur, 2013: 53-54).

Adapun dialek Baru digunakan oleh orang-orang Gorap di Loloda Utara. Orang-orang Gorap ini merupakan para pendatang dari Manggarai di Flores, Selayar, dan Buton. Mereka datang di Loloda karena dibajak oleh bajak laut Loloda dan didaratakan di Utara Loloda. Orang-orang Gorap inilah yang disebut sebagai orang Baharu yang oleh Van Barda mungkin menyebutnya sebagai Suku Baru di Loloda (de Clerq, 1890: 74; Van Barda, 1904: 319). Orang Loloda, Galela, dan Tobelo tampil dalam kegiatan bajak laut dengan istilah *Bajak Laut Tobelo* pada akhir abad ke-19. Kekuatan mereka saat itu berjumlah 400 orang. Mereka beroperasi di Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Sulawesi (Lapian, 2009: 117).

Keberadaan Suku Baru ini tentunya membawa bahasa tersendiri yaitu bahasa Gorap yang merupakan campuran dari bahasa-bahasa dari Manggarai, Selayar, dan Buton. Orang-orang Baru ini berinteraksi dengan orang-orang Loloda dari Suku Bakun sehingga diperkirakan terjadi perpaduan antara bahasa Gorap dengan Bahasa Loloda dari dielek Bakun, sehingga perpaduan itulah yang mungkin disebut dengan dialek orang Baru. Kondisi ini tergambar dari pernyataan van Frassen bahwa pada abad ke-19 terdapat Suku Baru, Bakun, Laba, dan Kedi di Loloda, di mana keempat suku ini

memiliki dialek bahasa yang sedikit berbeda (Van Frassen, 1979: 116). Namun, seiring dengan perjalanan waktu, dialek orang Baru ini tidak lagi terdengar dalam kehidupan masyarakat Loloda saat ini. Kondisi ini mungkin diakibatkan pengaruh dialek Bakun yang lebih mendominasi dialek orang Baru pada generasi berikutnya sehingga menghilangkan dialek orang-orang Baru (Mansur, 2013: 168).

Bahasa Galela

Bahasa Galela digunakan oleh sebagian penduduk Desa Supu, sedangkan yang lain menggunakan bahasa Loloda. Penggunaan dua bahasa di Kampung Supu telah ditulis oleh M.J. van Baarda mengenai perbandingan Tata Bahasa Loloda dan Galela pada 1904 yang menyebutkan bahwa masyarakat di Kampung Supu memakai bahasa Loloda dan bahasa Galela (Van Baarda, 1904: 319). Namun kapan sebagian masyarakat di Kampung Supu ini menggunakan bahasa Galela, tidak digambarkan oleh Van Baarda. Akan tetapi dilihat dari aspek geografis, letak Desa Supu yang berbatasan langsung dengan desa-desa di Galela menunjukkan bahwa masuknya bahasa Galela ke Supu sebagai proses akulturasi antara orang Loloda dan orang Galela. Proses akulturasi itu bisa terjadi melalui pola komunikasi dan sistem kekerabatan antara orang Loloda dan orang Galela sebagai satu rumpun non-Austronesia, namun juga bisa terjadi melalui sistem kekuasaan Kerajaan Loloda di masa lalu terhadap sebagian wilayah Galela. Kondisi ini dapat dilihat dari sastra lisan masyarakat Loloda yang mengisahkan tentang kekuasaan Kerajaan Loloda yang telah dibatasi oleh kekuasaan Kerajaan Ternate. Sastra lisan itu berbentuk ungkapan perasaan yang disebut *rorasa*. Adapun *rorasa* itu, sebagai berikut:

- a. *Suba Sailillab, suba Jou rikolano. Bolowasu setosonyinga, ni Morotia seni Morotai, ni Doitia seni Doitai, no kukaro aku ua, no sudo aku ua, hira pasa marua. Tika tara ni Galela ake sio, ni Tobelo ake sio, seni Kao ake sio, no kukaro aku ua, no sudo aku ua, umoku seni mabe madurari;*
- b. *Ni Buli seni Lolobata, ni Nauli seni Tapaleo, no kukaro aku, no sudo aku ua, umoku seni mabe madurari;*
- c. *Ni Maba seni Patani, no kukaro aku ua, no sudo aku ua, umoku seni mabe madurari;*
- d. *Ni Wosi seni Gane, no kukaro aku ua, no sudo aku ua, umoku seni mabe madurari. Tika tara ni bukum. Bakun kani debe madudan, Kimalaha Tobo-Tobo kani jiko madudan, seni hena mabere-bere, seni bido magate-gate, seni sebo mabere-bere;*
- e. *Suba Sailillab, suba Jou rikolano malamo-lamo.*

Terjemahan :

- a. *Sembah hanya kepada Allah, sembah kepada rajaku. Sepatut ku ingatkan. Moro di laut dan Moro di darat, Doi di laut dan Doi di darat, tak boleh kau panggil dan perintah mereka, mereka telah hilang lenyap. Lagi pula Galela sembilan air, Tobelo sembilan air, dan Kao sembilan air, tak boleh kau panggil dan perintah mereka, karena kau akan menghadapi aib dan malu yang sangat besar;*
- b. *Buli dan Lolobata, Nauli dan Tapeleo, tak boleh kau panggil dan perintah mereka, karena kau akan menghadapi aib dan malu yang sangat besar;*
- c. *Maba dan Patani, tak boleh kau panggil dan perintah mereka, karena kau akan menghadapi aib dan malu yang sangat besar;*
- d. *Wosi dan Gane, tak boleh kau panggil dan perintah mereka, karena kau akan menghadapi aib dan malu yang sangat besar. Tinggal yang ada adalah bukummu. Bakun penjaga tanjung, Kimalaha Tobo-Tobo sebagai penjaga teluk, pemegang sari pinangmu, penjolok sisrimu, dan pemegang sari enaumu;*
- e. *Sembah hanya kepada Allah, sembah kepada rajaku yang mulia* (Hasan, 2001: 179-181; Mansur, 2013: 77-79).

Tradisi lisan (*roras*) yang dikemukakan di atas memperlihatkan persebaran negeri-negeri di daratan Halmahera dan Pulau Morotai serta Pulau Doi di utara Halmahera. Di Halmahera Utara terdapat negeri Galela, Tobelo, Kao, dan Doitia. Pulau-pulau di utara Halmahera yakni Pulau Morotai dan Pulau Doi (Doitai). Di selatan Halmahera ada negeri Wosi dan Gane. Di timur dan tengah, ada negeri Maba dan Patani. Negeri-negeri yang disebutkan tersebut, saat ini terbagi ke dalam empat kabupaten yakni Pulau Morotai (Kabupaten Pulau Morotai); Morotia (sekarang telah terintegrasi ke dalam Kecamatan Galela), Tobelo, Kao, Doitia, dan Pulau Doi (Doitai) serta Pulau Tobo-Tobo masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Adapun Maba menjadi Ibu Kota Kabupaten Halmahera Timur dan Patani masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Sementara Wosi dan Gane masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun negeri Bakun saat ini menjadi salah satu desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat (Mansur, 2013: 78-79).

Dari tradisi lisan (*roras*) tersebut memberikan kesan atau asumsi bahwa wilayah-wilayah yang disebutkan di atas pada awalnya merupakan bagian dari wilayah geografis dan politik Kerajaan Loloda. Namun, wilayah-wilayah itu telah dibatasi dari perintah Raja Loloda. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa Kerajaan Loloda adalah pewaris dataran Pulau Halmahera, namun wilayahnya terbagi habis untuk Kesultanan Ternate dan Tidore (Hasan, 2001: 179-181). Pernyataan ini sesuai

dengan pendapat Paramita R. Abdurrahman sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa pada zaman tertua telah ada penguasa yang kuat di Loloda-Halmahera yang disebut *kolano* (Abdurrahman, 1979: 163; Mansur, 2013: 79).

Selain Tradisi lisan (*rorasa*) versi Loloda, ada juga tradisi lisan (*rorasa*) versi Ternate yang menghubungkan eksistensi kekuasaan Kerajaan Loloda terhadap wilayah-wilayah di utara dan barat Halmahera. Adapun *rorasa* tersebut, sebagai berikut:

<i>Gudu-gudu toma mie;</i>	<i>Jaub-jaub di Utara;</i>
<i>Susupu se Gamkonora;</i>	<i>Dari Susupu dan Gamkonora;</i>
<i>Tobaru se Tolofuo;</i>	<i>Tobaru dan Tolofuo;</i>
<i>Bantoli se Mandioli;</i>	<i>Bantoli dan Mandioli;</i>
<i>Doitia se Doitai;</i>	<i>Doi di darat dan Doi di laut;</i>
<i>Morotia se Morotai;</i>	<i>Moro di darat dan Moro di laut;</i>
<i>Kolano Loloda o gugu makuci.</i>	<i>Raja Loloda yang memegang kunci kekuasaan (Mansur, 2013: 83-84).</i>

Berdasarkan tradisi lisan (*rorasa*) versi Ternate, tergambar wilayah geografis dan politik Kerajaan Loloda terbentang dari bagian barat Halmahera dan bagian utara Halmahera. Keadaan ini bisa dilihat dari negeri-negeri yang terdapat dalam tradisi lisan di atas, merupakan bagian dari pengaruh dan kekuasaan Raja Loloda. Negeri Susupu, Gamkonora, Tobaru, dan Tolofuo, serta Bantoli terletak di bagian barat Halmahera, sedangkan Doitia, Doitai, Morotia, dan Morotai terletak di utara Halmahera (Mansur, 2013: 83).

Masuknya negeri-negeri yang disebutkan di atas sebagai wilayah Kerajaan Loloda dapat dipastikan sebelum wilayah-wilayah itu menjadi wilayah otoritas penuh Kesultanan Ternate. Hal ini dapat dilihat dari status negeri-negeri yang disebutkan di atas termasuk Loloda dijadikan distrik di bawah Kesultanan Ternate pada abad ke-18 M. Adapun distrik-distrik itu adalah: (1) Galela (2) Tobelo (3) Kau (4) Gamkonora (5) **Loloda** (6) Tolofuo (7) Tobaru (8) Sahu (9) Jailolo, dan (10) Gane di jazirah selatan (Leirissa, 1996: 64). Meskipun berstatus distrik, Penguasa Loloda tidak pernah memakai gelar *sangaji*, tetapi senantiasa memakai gelar raja (*kolano*) (de Clerq, 1890: 74; Van Barda, 1904: 320; Leirissa, 1996: 95). Ini menunjukkan bahwa sebelum abad ke-18 M, wilayah-wilayah yang disebutkan di atas berada di bawah pengaruh Kerajaan Loloda.

Khusus Kerajaan Moro, dileburkan ke dalam yurisdiksi Kesultanan Ternate pada perempatan akhir abad ke-16 M. Pada masa itu Kesultanan Ternate di bawah pemerintahan Sultan Baabullah Datu

Sjah (Amal, 2007: 210). Namun, sebelum Kerajaan Moro dilebur ke dalam yurisdiksi Kesultanan Ternate, belum dapat dijelaskan status Kerajaan Moro di mata Kerajaan Loloda. Berdasarkan sumber yang ada, dua kerajaan ini yang pertama menjadi penguasa di Halmahera (Hasan, 2001: 179). Bahkan ketika masuknya bangsa Portugis di Maluku, perhatian Portugis pun lebih banyak tertuju pada Kerajaan Moro sampai akhirnya Raja Moro pun dibabtis sebagai Katholik dengan nama *Don Joao de Mamuya* (Djafaar, 2007: 83; Amal, 2007: 215).

Suatu asumsi yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan ini adalah bahwa status Kerajaan Moro setelah dilebur ke dalam yurisdiksi Kesultanan Ternate berada di bawah pemerintahan tidak langsung. Dalam hal ini melalui Raja Loloda. Keadaan ini tergambar sesuai tradisi lisan versi Loloda di atas, yang menggambarkan bahwa pada prinsipnya wilayah-wilayah itu termasuk Loloda merupakan wilayah dari pengaruh Kesultanan Ternate. Selain itu, dalam tradisi lisan versi Ternate yang dikemukakan di atas, pada prinsipnya menggambarkan wilayah-wilayah yang berada di bawah Kesultanan Ternate, termasuk Loloda. Dengan perkataan lain, meskipun Penguasa Loloda memakai titel kolano, tetapi berada di bawah Kolano Ternate (Mansur, 2013: 84).

Berdasarkan asumsi dalam tradisi lisan baik versi Loloda maupun Ternate, dapat dikatakan bahwa secara politik, bahasa Galela masuk di Loloda khususnya di Desa Supu ketika adanya pengaruh kekuasaan Kerajaan Loloda di Galela. Pengaruh kekuasaan tersebut dapat terjadi setelah wilayah Galela yang dikuasai oleh Kerajaan Moro dilebur ke dalam yurisdiksi Kesultanan Ternate pada perempatan terakhir abad ke-16 M.

Bahasa Tabaru

Tabaru merupakan salah satu suku di pedalaman Halmahera. Populasi suku Tabaru saat ini paling banyak terdapat di Halmahera Barat tepatnya di Kecamatan Ibu. Karena wilayah Ibu Utara, masyarakat adalah Suku Tabaru, maka Kecamatan Ibu Utara pun diubah nama menjadi Kecamatan Tabaru. Menurut van Frassen (1987) bahwa persebaran Suku Tabaru terbentang dari Teluk Dodinga sampai selatan Loloda (Teluk Loloda).

Di Loloda, Suku Tabaru tersebar ke dalam empat kelompok masyarakat atau soa yang sekarang berkembang menjadi kampung atau desa yaitu Desa Tuguis, Desa Totala, Desa Tasye, dan Desa Jano. Kondisi ini dapat dilihat dari bahasa yang digunakan oleh keempat kampung atau desa tersebut adalah bahasa Tabaru. Eksistensi Suku Tabaru di Loloda telah diabadikan dalam tulisan van Barda pada 1904, di mana digambarkan bahwa Suku Tabaru sebenarnya tinggal di pedalaman Ibu dan menyebar ke pedalaman Loloda (Van Barda, 1904: 320).

Belum ada sumber yang menggambarkan tentang masuknya Suku Tabaru di Loloda. Namun berdasarkan catatan van Barda sebagaimana disebutkan di atas, dapat digambarkan bahwa Suku Tabaru telah menyebar dari pedalaman Ibu ke pedalaman Loloda setidaknya pada abad ke-19 M. Kondisi ini mengacu pada tulisan Van Barda yang dibuat pada 1904, di mana diprediksikan bahwa sebelum tahun 1904, Suku Tabaru ini sudah ada di Loloda. Mereka bermukim di sekitar kaki gunung Loloda atau gunung Tolimadu. Berdasarkan tradisi oral, dalam perkembangan sejarah tertentu, Suku Tabaru yang terbagi ke dalam kelompok Soa Jano, dan Soa Tasye yang tinggal di sekitar kaki gunung Loloda diperintahkan oleh Raja/Kolano Loloda untuk pindah ke arah barat mendekati beberapa komunitas suku Loloda (antara Soa Bakun, Laba, dan Kedi). Kelompok Soa Jano dipindahkan ke pedalaman antara Bakun dan Laba, sedangkan kelompok Soa Tasye dipindahkan ke pedalaman antara Soa Laba dan Soa Kedi. Adapun Soa Tuguis dipindahkan oleh Sangaji⁵ Tolofuo ke dekat pantai.

Keberadaan Suku Tabaru di Loloda membawa pengaruh terhadap dialek bahasa orang Loloda (Bakun dan Laba). Pengaruh itu dapat dilihat dari percampuran bahasa Suku Tabaru dengan bahasa Loloda pada dialek Bakun dan Laba. Kondisi ini dapat dilihat dari dialek Kedi sebagaimana digambarkan sebelumnya.

Bahasa Ternate

Bahasa Ternate yang terdapat di Loloda digunakan oleh masyarakat di Desa Soa-Sio, Kahatola, Tolofuo, dan sebagian penduduk Desa Baja. Desa-desanya ini terletak di Loloda bagian selatan, kecuali Desa Baja terletak di Loloda bagian tengah. Penggunaan bahasa Ternate oleh masyarakat di empat desa tersebut menunjukkan adanya hubungan kebudayaan dengan orang Ternate. Khusus untuk Desa Soa-Sio, letaknya bertetangga dengan Desa Kedi yang berjarak kurang lebih 150 meter. Namun sebelumnya, penduduk Soa-Sio ini tinggal di daerah aliran sungai (DAS) Soa-Sio yang bertetangga langsung dengan Desa Bakun. Diduga orang-orang Soa-Sio ini berasal dari Soa Bakun dan Soa Laba yang membentuk suatu pemukiman baru. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya hubungan keluarga antara orang Soa-Sio, Bakun, dan Laba.

⁵ Dalam sistem pemerintahan VOC dan Hindia Belanda, *sangaji* dianggap sebagai yang bertanggung jawab atas distrik (Leirissa, 1996: 63). Dari sini dapat dikatakan bahwa wilayah *sangaji* sama dengan distrik. Sebelum jabatan *sangaji* disamakan dengan kepala distrik, kedudukan seorang *sangaji* sama dengan kedudukan *adipati* dalam struktur kekuasaan di Jawa (Tjandrasasmita, 2001: 23).

Pembentukan pemukiman orang Soa-Sio kemudian menjadikan Soa-Sio sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Loloda sekaligus membedakan status sosial dengan orang Bakun dan Laba. Kondisi ini terlihat dari data penduduk di Loloda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917, menunjukkan bahwa penduduk Kampung Soa-Sio adalah Muslim, sedangkan penduduk Kampung Bakun, Laba, dan Kedi belum memiliki agama atau kafir (*Statistiek der bevolking Onderafdeeling Djailolo* dalam Baretta, 1917: 104-106). Selain itu, orang-orang Soa-Sio merupakan golongan penguasa dalam perspektif feodalisme di Loloda. Hal ini tergambar dari makna kata Soa-Sio yang menggambarkan sembilan kelompok masyarakat atau sembilan soa yang memiliki kedudukan dan fungsi dalam dewan kerajaan, termasuk kelompok masyarakat yang menempati kedudukan raja (*kolano*). Adapun Sembilan soa itu adalah *Soa Bangsa* (golongan bangsawan yang memegang kedudukan raja); *Soa Kimalaha* (menjalankan pemerintahan) *Soa Hukum* (melaksanakan peradilan), *Soa Lebe* (melaksanakan urusan Syari'ah Islam); *Soa Sabuange* (penasehat kolano); *Soa Dumo* (pelayan kolano); *Soa Kori* (penjaga hutan), *Soa Tobo-Tobo* (penjaga pantai/teluk); dan *Soa Mandioli* (prajurit perang) (Mansur, 2013: 148).

Belum dapat dipastikan waktu terbentuknya pemukiman penduduk Soa-Sio. Namun berdasarkan tulisan C.H. F. van Fraassen yang berjudul *Types of Socio Political Structure in North-Halmahera History* (1979), menggambarkan bahwa pada abad ke-17 M, Loloda telah memiliki sebuah pusat Muslim karena pada 1686 kampung utama Loloda dan kediaman Raja atau Kolano Loloda adalah kampung Muslim di tepi Sungai Loloda, sehingga ia menyimpulkan bahwa Kolano Loloda adalah seorang Muslim (Van Fraassen, 1979: 115). Kampung Muslim yang dimaksud van Frassen tersebut dapat dipastikan adalah Soa-Sio karena penduduk dan kampung Soa-Sio sebelum direlokasi ke daratan Kedi, terletak di daerah aliran sungai (DAS) bertetangga dengan kampung Bakun. Selain itu, di bekas kampung Soa-Sio tersebut terdapat situs Kedaton Raja Loloda. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa terbentuknya pemukiman penduduk Soa-Sio, setidaknya terjadi pada 1686.

Untuk penggunaan bahasa Ternate di kampung atau desa Tolofuo dapat juga dikatakan terjadi karena pengaruh politik Kesultanan Ternate. Kondisi ini terlihat dari kedudukan kampung Tolofuo pada masa lalu menjadi pusat pemerintahan sangaji sehingga penetrasi politik Kesultanan Ternate dengan menjadikan bahasa Ternate sebagai *lingua franca* dikonsentrasikan pada pusat-pusat pemerintahan sangaji atau distrik.

Adapun penggunaan bahasa Ternate pada sebagian penduduk Desa Baja terjadi karena sebagian penduduk yang menggunakan bahasa Ternate tersebut berasal dari Soa-Sio. Hal ini dapat dilihat dari kelompok keluarga keturunan Raja atau Kolano Loloda yang tinggal di Desa Baja. Belum

dapat dipastikan kapan orang-orang Soa-Sio dari keluarga Kolano Loloda ini mulai tinggal di desa Baja, namun berdasarkan rekonstruksi sejarah menunjukkan bahwa salah seorang putera Kapita Lau⁶ Loloda yang bernama Kaicil Puasa pernah menjabat sebagai Kepala Onder Distrik⁷ atau Hamente Baja pada 1930 (Mansur, 2013: 123). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahasa Ternate digunakan di Kampung Baja setidaknya pada 1930. Sementara bahasa Ternate yang digunakan oleh penduduk Kahatola, karena orang Kahatola juga berasal dari Soa-Sio. Orang Kahatola ini pindah dari Soa-Sio dan menempati Pulau Kahatola yang membentang di Teluk Loloda pada tahun 1982. Pada tahun 1982 sampai 2006, status Kahatola adalah anak desa (dusun) dari Soa-Sio, dan menjadi desa otonom pada tahun 2006.

Hubungan kultural antara orang Ternate dan orang Loloda terbentuk dari penetrasi politik Kesultanan Ternate di Loloda. Dalam penetrasi itu, bahasa Ternate menjadi *lingua franca* dalam sistem kekuasaan Kesultanan Ternate. Konsentrasi penetrasi lebih ditekankan pada masyarakat di negeri Soa-Sio dan Tolofuo karena Soa-Sio merupakan pusat pemerintahan Kolano Loloda, sedangkan Tolofuo merupakan pusat pemerintahan Sangaji Tolofuo. Berdasarkan catatan sejarah, pengaruh politik Kerajaan Ternate di Loloda secara *de jure* terjadi pada abad ke-18 M. Hal ini dapat dilihat dari status negeri-negeri yang disebutkan di atas termasuk Loloda dan Tolofuo dijadikan distrik di bawah Kesultanan Ternate pada abad ke-18 M.

Akan tetapi secara *de facto*, wilayah Loloda tetap berada di bawah pemerintahan Raja Loloda hingga 1909. Hal ini dapat dilihat dari Penguasa Loloda yang tidak mau memakai gelar sangaji sebagai kepala distrik, namun Penguasa Loloda senantiasa memakai titel Kolano Loloda pada kurun waktu tersebut. Bahkan ketika kedudukan Kolano Loloda disamakan dengan *jogugu* pada tahun 1945 (pasa proklamasi kemerdekaan RI), orang Loloda tetap menganggapnya sebagai kolano sehingga mereka menyebutnya dengan ungkapan *Jou* yang menunjukkan seorang kolano (Mansur, 2013: 135).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masuknya bahasa Ternate di Loloda setidaknya terjadi pada abad ke-18 M.

⁶ Kapita Lau adalah panglima laut kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Jabatan ini biasanya dijabat oleh seorang pangeran atau prins.

⁷ *Onderdistrik* adalah satuan pemerintahan di bawah distrik. Kepala *onderdistrik* disebut *asisten wedana* (ANRI, 1998: xiv). Di Maluku Utara, kepala onder distrik biasa disebut dengan istilah *Haminte*.

Penutup

Keberadaan bahasa-bahasa etnis dan dialek-dialek bahasa Loloda di Loloda merupakan pola interaksi kebudayaan yang merentang dalam ruang geografis dan politik masa lalu yang memiliki dimensi keberlanjutan di masa kini sebagai sebagai realitas sosial. Sebagai realitas sosial, keberadaan bahasa-bahasa etnis dan dialek bahasa Loloda adalah produk keragaman dan identitas masyarakat Loloda yang tidak dapat dipungkiri, bagaimana realitas itu menjelma dalam wujud kebudayaan masyarakat Loloda saat ini. Wujud kebudayaan itu merupakan warisan budaya takbenda (WBTB) yang perlu dilestarikan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Warisan budaya perlu dilestarikan karena bersifat “tidak diperbaharui, terbatas, dan kontekstual, serta ada suatu kebutuhan yang mendesak untuk melestarikan (*to conserve*) dan mengelola (*to manage*) agar terjamin keberadaannya selama mungkin.

Referensi

- Abdurrahman, Paramita R. 1979. “Moluccan Responses to the First Intrusions of the West” dalam Haryati Soebadio & Carien A. du Marchie Sarvaas (ed), *Dynamics of Indonesia History*. Amsterdam: Nortt-Holland Publishing Company, hlm. 163.
- Amal, M. Adnan. 2007. *Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara* . Edisi Revisi. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Andi Atjo, Rusli. 2009. *Orang Ternate dan Kebudayaanannya*. Jakarta: Cikoro Trirasuandar.
- Baretta, J.M. 1917. *Halmahera en Morotai Bewerk Naar de Memorie van Den Kapitein van Den Generalen Staf*. Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.
- de Clerq, F. S. A. 1890. *Ternate: The Residency and Its Sultanate*, Translated: from the Dutch by Paul Michael Taylor and Marie N. Richards. Woshington D.C.: Smithsonian Institution Libraries.
- de Graff, S. en Stibbe, D.G. 1918. *Encyclopaedy Nederlandsch-Indie Tweede Druk*.
- Gottschalk, Louis. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugoroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hasan, Abdul Hamid. 2001. *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- Kusnanto, dkk. 2010. *Sejarah Sosial Kesultanan Ternate*. Laporan Penelitian. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Kementerian Agama RI.
- Leirissa, R.Z. 1996. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergolakan Sekitar Laut Seram Abad ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leirissa, R.Z. 1999. *Sejarah Kebudayaan Maluku*. Jakarta: Depdikbud.

- Masinambow, E.K.M. 2001. "Bahasa Ternate dalam Konteks Bahasa-Bahasa Austronesia dan Non Austronesia" dalam Yusuf Abdulrahman, *et al.*, *Ternate Bandar Jalur Sutera*. Ternate: Lintas, hlm. 142-147.
- Murid. 2019. "Demokrasi dalam Ruang Khayal Bangsawan dan Birokrat-Politisi Maluku Utara." dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha Universitas Diponegoro*, hlm. 111-123. Diakses pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/view/24875>.
- Pratama, Manalu, Rozak, 2022. "Difusi Kebudayaan pada Kesenian Tulo-Tulo di Kota Sabang" dalam *Gorga : Jurnal Seni Rupa Unimed*. Diakses pada <file:///C:/Users/Personal/Downloads/38329-91301-1-PB.pdf>
- Tjandrasasmita, Uka. 2001. "Struktur Masyarakat Kota Pelabuhan Ternate (Abad ke-14-Abad ke 17)" dalam Yusuf Abdulrahman, *et al.*, *Ternate Bandar Jalur Sutera*. Ternate: Lintas, hlm. 23.
- Van Fraassen, Ch. F. 1978. "Types of Socio-Political Structure in North-Halmaheran History". *Majalah Ilmu-Umu Sastra Indonesia*. Jilid II No. 2 hal. 115.
- Indonesia, Arsip Nasional. 1998. *Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940*. Jakarta: ANRI.
- Lembaran Negara RI "Tahun 2003 Nomor 21". Diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13343/node/538/uu-no-1-tahun-2003-pembentukan> pada 23 November 2012, pkl. 14.06 WIB.
- Pengertian Akulturasi Budaya. Diakses pada <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/31/120000369/pengertian-akulturasi-budaya-dan-contohnya>
- Huiting, A. 1908. "Tets Over de ..Ternataansch Halmahèrasche Taalgroep". *BKI*. Vol, 60 No, (1908)". Diakses dari <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv/article/view/6876/7643> Pada 2 Januari 2013, pkl. 15.41 WIB.
- Van Baarda, M.J. 1904. "Het Loda'sch, in vergelijking met het Galala'sch dialect op Halmaheira". *BKI*. Vol. 56, No. 1, 1904. Diakses dari <http://www.kitlvjournals.nl/index.php/btlv/article/viewFile/6762/7529>, pada 20 November 2012, pkl. 19.48 WIB.